

BAB. I

PENDAHULUAN

A. Latarbelakang Masalah

Indonesia sebagai Negara agraris memiliki modal yang cukup besar untuk menjadi Negara berkecukupan pangan, modal yang besar itu ialah luas lahan pertanian, kesuburan tanah, dan keanekaragaman pangan. Karena ketahanan pangan merupakan salah satu faktor penentu dalam stabilitas nasional suatu negara, baik di bidang ekonomi, keamanan, politik dan sosial. Presiden RI pertama Soekarno menyadari betul pentingnya penyediaan pangan bagi kelangsungan kehidupan bangsanya. Pada tanggal 27 April 1952, saat acara peletakan batu pertama pembangunan gedung Fakultas Pertanian Universitas Indonesia di Bogor, Presiden Soekarno menyatakan dalam pidatonya :

“..... Apa yang saya hendak katakan itu, adalah amat penting, bahwa mengenai soal mati - hidupnya bangsa kita di kemudian hari oleh karena itu, soal yang hendak saya bicarakan itu mengenai soal persediaan makan rakyat¹ “.

Secara esensial dapat dikatakan bahwa ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Jelas

bahwa pengertian pangan ini tidak hanya bersifat kuantitatif saja, tetapi juga mencakup aspek kualitatif (aman, bermutu dan bergizi).

Dukungan dibidang pertanian selain menjaga untuk ketahanan pangan, pertanian juga menyerap tenaga kerja terbesar, mencapai 42,5%, dan tempat bergantung hidupnya 26 juta keluarga petani (130 juta jiwa) serta sebagai basis perekonomian perdesaan². Oleh karena itu Negara dalam menganbil kebijakan harus mampu berdiri atau berdaulat pada bidang pangan. Yang berarti kedaulatan Pangan mencerminkan hak menentukan kebijakan secara mandiri, menjamin hak atas pangan bagi rakyat, dan memberi hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem usaha sesuai dengan potensi sumber daya dalam negeri. Kedaulatan pangan merupakan wujud kemampuan Negara memproduksi pangan di dalam negeri secara bermartabat. Terwujudnya ketahanan pangan hanyalah *ultimate goal*, karena sejatinya pencapaian akhir yang diharapkan dari kondisi tersebut adalah ketahanan nasional yang tangguh.

Karena pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Oleh karena itu, Negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di

seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal. Sebagai Negara dengan jumlah penduduk yang besar dan disisi lain memiliki sumber daya alam dan sumber pangan yang beragam, Pemerintah Indonesia telah berupaya untuk mampu memenuhi kebutuhan Pangannya secara berdaulat dan mandiri.

Keseriusan pemerintah dalam menangani masalah pangan ini terlihat dari penggantian UU no 7 Tahun 1996 Tentang Pangan kerana dirasa tidak sesuai dengan kebutuhan saat ini, maka diganti dengan UU no 18 Tahun 2012 Tentang Pangan³. Maka untuk menjalankan kebijakan agar lebih efektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten / kota dan pemerintah desa melaksanakan kebijakan ketahanan pangan dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan ketahanan pangan di wilayahnya masing-masing dengan memperhatikan pedoman, norma, standar dan kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat⁴.

Pembangunan ketahanan pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi penduduk disuatu wilayah merupakan salah satu urusan wajib pemerintah, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota karena terkait dengan pelayanan dasar terhadap masyarakat⁵. Kondisi ini memberikan landasan dan peluang untuk pengembangan sistem ketahanan pangan daerah sesuai dengan

³ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang *Pangan, Menimbang huruf d.*

⁴ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*

⁵ PP nomor 38 Tahun 2007 Tentang *Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,*

kebijakan daerah. Seperti halnya Pemerintah Kabupaten Sleman telah melaksanakan berbagai program atau kegiatan yang bermuara pada upaya pemantaban ketahanan pangan. Berbagai upaya dalam urusan ketahanan pangan tidak hanya berfokus pada peningkatan ketersediaan pangan, pemerataan distribusi pangan dengan harga terjangkau dan tercapainya pola konsumsi pangan yang aman, bergizi dan beragam, namun juga meningkatkan peran masyarakat dan pihak swasta dalam mendukung ketahanan pangan.

Salah satu kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah Sleman Berdasarkan Pasal 10 Perpres No 83 Tahun 2008 tentang Dewan Ketahanan Pangan (DKP), untuk mengupayakan terwujudnya ketahanan pangan Kabupaten Sleman sebagai bagian dari ketahanan pangan nasional, telah ditetapkan Keputusan Bupati Nomor 255/Kep.KDH/ A/2011 tertanggal 1 Agustus 2011 tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Sleman.

Dewan Ketahanan Pangan bertugas sebagai :

- a. Merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan kabupaten meliputi penyediaan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman pangan, pencegahan dan penanggulangan masalah pangan dan gizi dengan memperhatikan kebijakan yang ditetapkan oleh DKP Pusat dan DKP Propinsi.
- b. Merumuskan kebijakan dalam rangka mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan

- c. Melaksanakan evaluasi dan pengendalian perwujudan ketahanan pangan kabupaten.

Kebijakan pelaksanaan urusan wajib ketahanan pangan di Kabupaten Sleman pada tahun 2011 sesuai RPJMD Tahun 2011 – 2015 adalah mengembangkan pertanian pangan lokal ke arah agribisnis dengan memperkuat ketahanan pangan. Dalam melaksanakan urusan wajib ketahanan pangan didukung berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD yang bersangkutan maupun SKPD terkait antara lain :

- a. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan (17 kegiatan)
 - 1) Penanganan daerah rawan pangan
 - 2) Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan
 - 3) Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan
 - 4) Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat
 - 5) Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian
 - 6) Pengembangan cadangan pangan daerah
 - 7) Pengembangan desa mandiri pangan
 - 8) Pengembangan lumbung pangan desa
 - 9) Pengembangan perbenihan/pembibitan
 - 10) Pengembangan Sistem Informasi Pasar
 - 11) Penyuluhan sumber pangan alternatif

- 13) Peningkatan mutu dan keamanan pangan
 - 14) Peningkatan produksi, produktifitas dan mutu produk perkebunan/Produk pertanian.
 - 15) Peningkatan produksi, produktifitas, dan mutu produk peternakan
 - 16) Peningkatan produksi, produktifitas, dan mutu produk hortikultura
 - 17) Pemantauan, pengawasan, peredaran penggunaan pupuk dan pestisida.
- b. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
 - c. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/
Perkebunan
 - d. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan
 - e. Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan

Meskipun Kabupaten Sleman dikaruniai kondisi alam yang subur, tetapi Sumber Daya Alam dan lahan budidaya pertanian semakin terbatas karena tergerus pembangunan gedung-gedung ataupun perumahan. Salah satu kebijakan untuk memantapkan ketahanan dan kemandirian pangan adalah terus berupaya mendorong masyarakat untuk mengembangkan produk pangan olahan. Melalui produk pangan olahan ini, selain sebagai sumber pemenuhan gizi keluarga, juga

Pemerintah Kabupaten Sleman meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mewujudkan ketahanan pangan, dengan pemberdayaan usaha melalui kelompok-kelompok usaha produktif. Saat ini di Kabupaten Sleman terdapat 1428 kelompok usaha di bidang pertanian. Melalui Kelompok usaha bersama tentunya memberikan kesempatan bagi para anggotanya untuk melakukan usaha ekonomi produktif dengan memberdayakan anggota dan lingkungan sekitarnya. Berkembangnya kelompok-kelompok usaha masyarakat tersebut, tentunya tidak terlepas dari keberadaan para penyuluh dan pengawas, yang senantiasa memberikan bimbingan usaha bagi masyarakat. Pemkab Sleman memberikan bantuan pendampingan dalam hal pemasaran produk-produk olahan pangan masyarakat, agar lebih terserap pasar, yang akhirnya dapat memberikan keuntungan ekonomi lebih bagi masyarakat. Untuk meningkatkan kapasitas usaha, Pemkab Sleman menggulirkan bantuan penguatan modal yang jumlahnya mencapai Rp. 13 Milyar, bagi kelompok usaha pertanian⁶.

Guna mendukung upaya ketahanan pangan di Sleman, Pemkab Sleman juga menginstruksikan kepada semua instansi di lingkungan Pemkab Sleman agar menyajikan makanan lokal pada setiap acara pertemuan dan pelatihan. Kedepan, Pemkab Sleman juga akan mendorong pelaku usaha hotel maupun restoran untuk juga menyajikan makanan lokal kepada para tamu atau para pengunjung.

Pembangunan pertanian pada tahun 2011 mampu mendukung produksi tanaman pangan berupa padi sawah dan ladang sebanyak 232.713 ton untuk

pemenuhan kebutuhan beras di Kabupaten Sleman dan kabupaten lain di Provinsi DIY. Sementara produksi beberapa tanaman pangan lainnya mengalami penurunan karena terjadinya fenomena perubahan iklim yang ekstrim (curah hujan sangat tinggi) dan serangan organisme pengganggu tanaman yang semakin meningkat. Perkembangan beberapa produk tanaman pangan dan hortikultura dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 1.1 Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2007-2011
(dalam ton)**

No	Produk	2007	2008	2009	2010	2011
1.	Padi sawah	242.684	267.607	268.075	264.317	231.374
2.	Padi ladang	194	1.321	1.329	1.756	1.339
3.	Beras	153.535	169963	170.263	168.158	147.075
4.	Jagung	26.629	30.896	32.712	31.703	38.111
5.	Kedelai	705	1.130	772	698	775
6.	Ubi kayu	19.923	24.449	26.153	20.868	14.741
7.	Pisang	12.049	12.351	12.319	10.020	6.276
8.	Rambutan	15.734	16.119	19.748	16.722	16.432
9.	Cabe	3.741	3.754	3.951	4.123	4.053
10.	Kacang Panjang	1.377	1.938	2.141	2.463	1.876
11.	Salak	57.605	58.217	58.599	56.554	33.340

Sumber : <http://www.slemankab.go.id/3271/pertanian-perikanan-dan-kehutanan.slm>

Jumlah populasi ternak secara umum mengalami peningkatan, sedangkan produksi telur, susu dan daging pada tahun 2011 mengalami sedikit penurunan

kecuali telur, susu dan daging populasi ternak di wilayah sentra produksi susu dan telur

(Cangkringan dan Pakem) akibat erupsi Merapi pada tahun 2010. Berikut adalah table hasil ternak :

Tabel 1.2 Perkembangan Produksi Hasil Ternak (dalam ton)

No.	Ternak	2007	2008	2009	2010	2011
1.	Telur	17.523,72	19.449,16	19.550,57	18.133,88	17.647,00
2.	Susu	6.687,88	5.712,16	5.527,41	4.597,59	2.756,63
3.	Daging	20.515,81	21.558,31	21.776,59	21.348,85	19.749,19

Sumber : <http://www.slemankab.go.id/3271/pertanian-perikanan-dan-kehutanan.slm>

Peningkatan jumlah produksi ikan konsumsi pada tahun 2011 sebesar 26,0%, produksi ikan hias meningkat sebesar 4,05%, dan produksi benih ikan meningkat sebesar 6,91%. Peningkatan produktifitas perikanan tersebut dikarenakan adanya peningkatan produktivitas kolam, jumlah kelompok pembudidaya meningkat 7,24% menjadi 415 kelompok, peningkatan produktivitas alat tangkap perairan umum, serta meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan pembudidayaan ikan.

Tabel 1.3 Perkembangan Produksi Ikan Tahun 2007– 2011

No.	Produksi Ikan	2007	2008	2009	2010	2011
1.	Ikan Konsumsi (ton)	8.148,85	10.297,78	12.425,90	14.574,68	18.364,10
2.	Ikan Hias (ekor)	7.818.000	9.278.860	9500000	11.445.500	11.909.300
3.	Benih Ikan (ekor)	532.156.500	704.545.000	789367500	785.857.500	840.182.800

Tingkat konsumsi ikan pada tahun 2011 meningkat 3,93% menjadi 27,78 kg/kapita/tahun dari 26,73 kg/kapita/tahun pada tahun 2010. Tingkat konsumsi tahun 2011 ini lebih tinggi bila dibandingkan dengan tingkat konsumsi Provinsi DIY sebesar 12,80 kg/kapita/tahun.

Kerjakeras dalam menghasilkan pangan pemerintah kabupaten turut melibatkan kelompok petani maupun individu, hingga mampu mendapatkan hasil yang sangat bagus, tidak hanya karena hasil pangan semakin melimpah, Kabupaten Sleman juga telah mendapatkan lima penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara dan Ketahanan Pangan Tahun 2012⁷.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan yang telah dijelaskan pada latar belakang, bahwa masalah pangan adalah masalah yang sangat krusial dan pangan merupakan hak setiap manusia untuk mendapatkannya. Maka penulis merumuskan dalam penelitian ini adalah **“Bagaimana Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan Yang Dirumuskan Dewan Ketahanan Pangan di Kabupaten Sleman?”**.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Dari hasil penelitian ini, peneliti mempunyai tujuan untuk memperoleh informasi guna menjawab pertanyaan pada perumusan masalah penelitian ini. Maka tujuan penelitian ini adalah :

- a) Untuk mengetahui kebijakan – kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Sleman Dalam Mancapai Kedaulatan Ketahanan Pangan.
- b) Untuk mengetahui efektifitas kebijakan pangan yang telah diambil oleh pemerintah Kabupaten Sleman

2. Manfaat

Suatu penelitian tentunya diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang ada. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

2.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur dalam dunia kepastakaan tentang pelaksanaan kebijakan Pemerintah daerah

2.2. Manfaat Praktis

- a) Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pola pikir dan untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan Ilmu Pemerintahan yang diperoleh selama bangku kuliah.
- b) Penelitian ini diharapkan dapat membantu, memberikan tambahan masukan dan pengetahuan kepada pihak-pihak terkait dengan masalah yang sedang diteliti, juga kepada berbagai pihak yang berminat pada permasalahan yang sama.

D. Kerangka Dasar Teori

Kerangka dasar teori adalah teori-teori atau konsep yang digunakan dalam melakukan kegiatan penelitian. Atau sering juga dikatakan bahwa kerangka dasar teori merupakan uraian yang menjelaskan variable-variable dan hubungan antar variable berdasarkan konsep atau definisi tertentu. Dengan landasan teori tersebut maka kegiatan penelitian ini menjadi jelas, sistematis, dan ilmiah. Teori mempunyai peran yang cukup besar dalam suatu penelitian, dikarenakan dengan unsur inilah peneliti akan mencoba menerangkan fenomene-fenomena sosial atau gejala-gejala alami yang menjadi pusat perhatian.

Dalam hal ini beberapa definisi mengenai teori, menurut Koendjaningrat, teori adalah merupakan pernyataan mengenai adanya suatu hubungan positif antara gejala yang diteliti dari satu atau beberapa faktor tertentu dalam masyarakat.⁸ Menurut Masri Sangaribuan, teori adalah serangkaian asumsi,

⁸ Koendjaningrat, *Metode Penelitian Pendidikan*, PT Gramedia, Jakarta, 1991.

konsep, abstrak, defenisi dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena social antara sistematis dengan cara merumuskan hubungan anatar konsep.⁹

Dari beberapa pengertian teori diatas dapat disimpulkan bahwa teori merupakan suatu pendapat atau definisi yang digunakan sebagai sarana pokok untuk menjelaskan hubungan-hubungan variable yang hendak diteliti. landasan pemikiran yang akan digunakan sebagai kerangka dasar dalam penelitian ini meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan dari pemerintahan. Dalam teori pareto, kebijakan publik ialah faktor penentu 20% yang menyebabkan 80%. Jadi kebijakan publik merupakan faktor penentu kritikal bagi kemajuan atau kemunduran suatu bangsa. Menurut Heinz Eulau, Kebijakan Publik adalah keputusan tetap yang bercirikan dengan adanya konsistensi dan pengulangan (repetitiveness) pada tingkahlaku pembuat keputusan dan mereka yang mematuhi keputusan tersebut¹⁰.

Kebijakan Publik berarti mengenai apasaja yang diucapkan (says) dan apasaja yang dilakukan (does) oleh pemerintah tentang suatu persoalan berarti juga Kebijakan Publik merupakan sebuah statement dan tindakan nyata pemerintah untuk memecahkan masalah publik. Segala apapun yang diucapkan

⁹ Masri Singarumbun dan Sofian Efendi, *Metode Ppenelitian Survey*, LP3ES, Jakarta, 1989.

¹⁰

dan dilakukan oleh pemerintah mengenai hal tertentu tersebut merupakan suatu bentuk keputusan yang diambil¹¹.

Sedangkan menurut Charles A. Jones Kebijakan Publik dipandang selain meliputi hal-hal yang dilakukan pemerintah tapi juga pemahaman mengenai hal yang tidak dilakukan pemerintah. Yang berarti Keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu¹².

Dalam siklus pemerintahan atau perpolitikan suatu negara, kebijakan publik merupakan output paling nyata dan paling utama dari setiap sistem politik atau dengan kata lain, kebijakan publik merupakan bentuk riil dari politik. Bagi negara berkembang, politik yang menjalankan negara disebut politik pembangunan. Politik pembangunan merupakan politik suatu negara-bangsa, yang diturunkan dari pilihan atas ideologi pilihan suatu bangsa. Jika Pancasila menjadi filosofi atau ideologi, politiknya adalah demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila mempunyai bentuk operasional pada tingkat politis dalam bentuk politik pembangunan, dan politik pembangunan mempunyai bentuk operasional kebijakan publik pembangunan atau dapat dipahami sebagai kebijakan publik.

Dalam mencapai tujuan negara pemerintah membutuhkan kebijakan sebagai alat untuk mengatur langkah yang akan diambil, karena ditengah masyarakat pemerintah tidak akan mampu menjalankan fungsinya tanpa dibantu oleh kebijakn publik. Mengutip dari buku Public Policy dikembangkan dari diskusi dengan prof. Dr. Eko Prasjo guru besar ilmu administrasi, pada dasarnya

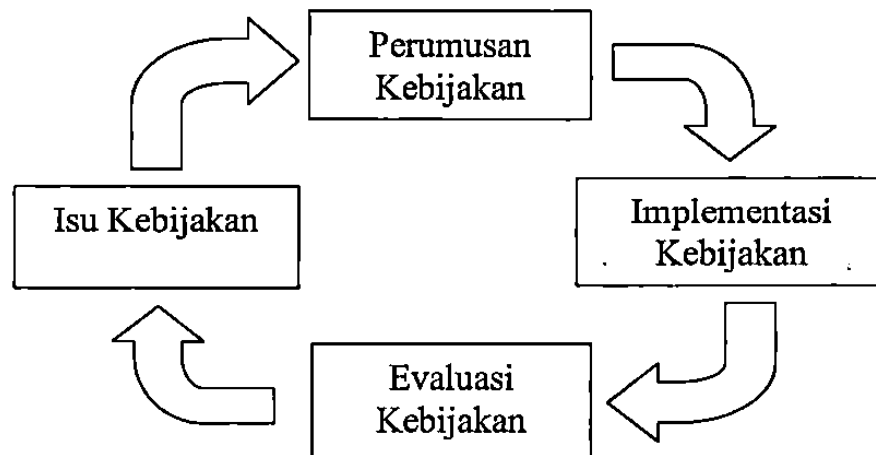
dalam memahami kebijakan publik ada dua jenis aliran atau pemahaman, yaitu kontinentalis dan Anglo-saxonis¹³. Pemahaman kontinentalis melihat bahwa kebijakan publik adalah turunan dari hukum, bahkan kadang mempersamakan antara kebijakan publik dengan hukum.

Yang berarti kebijakan publik merupakan produk dari negara atau pemerintah, sedangkan masyarakat sebagai penerimanya. Sedangkan Anglo-saxon memahami bahwa kebijakan publik adalah turunan dari politik demokrasi sehingga melihatnya sebagai sebuah produk interaksi antara negara dan publik. Sehingga interaksi tidak hanya terjadi antara masyarakat dengan masyarakat saja, namun masyarakat dengan negara. Karena dalam pemahaman Anglo-saxon masyarakat harus dilibatkan dalam pembuatan kebijakan publik, sehingga masyarakat tidak hanya sebagai penerima dari kebijakan yang dibuat pemerintah.

Seperti yang telah dikatakan sebelumnya bahwa kebijakan publik yang akan menentukan keberhasilan suatu negara. Sehingga sangat dibutuhkan suatu kebijakan publik yang sangat baik dan sesuai dengan kebutuhannya. Secara ideologis, teoritis, dan metodologis sistematikan pembuatan kebijakan publik digambarkan sebagai berikut :

¹³ Dr. Riant Nugroho, *Teori Kebijakan-Analisis Kebijakan-Proses Kebijakan. Perumusan, Implementasi, Evaluasi, Revisi, Risk Managemen Dalam Kebijakan Publik. Kebijakan Publik Sebagai The Fifth Estate-Metode Penelitian Kebijakan Publik*, Jakarta : PT Elex Media

Gambar 1.1 : Pemahaman Dasar Proses Kebijakan



Sumber : Ibid¹⁴

Gambar diatas dapat dijelaskan dalam sekuensi berikut :

1. Isu kebijakan. Disebut isu apabila bersifat strategis, yakni bersifat mendasar, yang menyangkut banyak orang atau bahkan keselamatan bersama, (biasanya) berjangka panjang tidak bisa diselesaikan oleh orang-seorang, dan memang harus diselesaikan. Isu ini dianggap sebagai agenda politik untuk diselesaikan. Isu kebijakan terdiri atas dua jenis, yaitu problem dan goal. Artinya, kebijakan publik dapat berorientasi pada permasalahan yang muncul pada kehidupan publik, dan dapat pula berorientasi pada goal atau tujuan yang hendak dicapai pada kehidupan publik. Pada saat itu, sebagian besar kebijakan publik mengacu pada permasalahan daripada antisipasi kedepan, dalam bentuk berorientasi pada kebijakan dalam bentuk hal-hal yang melihat kebijakan

publik yang berjalan tertatih-tatih di belakang masalah publik yang terus bermunculan- dan akhirnya semakin tak tertangani.

2. Isu kebijakan ini kemudian menggerakkan pemerintah untuk merumuskan kebijakan publik dalam rangka menyelesaikan masalah tersebut. Rumusan kebijakan ini akan menjadi hukum bagi seluruh warga negara, termasuk pimpinan negara.
3. Setelah dirumuskan, kebijakan publik ini kemudian dilaksanakan baik oleh pemerintah atau masyarakat maupun pemerintah bersama-sama masyarakat.
4. Namun dalam proses perumusan, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan, diperlukan tindakan evaluasi sebagai sebuah siklus baru untuk dinilai apakah kebijakan tersebut sudah dirumuskan dengan baik dan benar dan diimplementasikan dengan baik dan benar pula.
5. Implementasi kebijakan bermula pada output yang dapat berupa kebijakan itu sendiri ataupun manfaat langsung yang dapat yang dirasakan langsung oleh pemanfaat.
6. Dalam jangka panjang, kebijakan tersebut menghasilkan outcome dalam bentuk dampak kebijakan yang diharapkan semakin meningkatkan tujuan yang hendak dicapai dengan kebijakan tersebut.

2. Implementasi Kebijakan

2.1 Pengertian implementasi kebijakan

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas untuk kemudian diputuskan. Implementasi dapat diartikan sebagai proses yang terjadi setelah sebuah produk hukum dikeluarkan yang memberikan otorisasi terhadap suatu kebijakan, program atau output tertentu. Implementasi merujuk pada serangkaian aktivitas yang dijalankan oleh pemerintah yang mengikuti arahan tertentu tentang tujuan dan hasil yang diharapkan. Implementasi meliputi tindakan-tindakan (dan non-tindakan) oleh berbagai aktor, terutama birokrasi, yang sengaja didesain untuk menghasilkan efek tertentu demi tercapainya suatu tujuan¹⁵.

Definisi yang lain diberikan oleh Malcolm L. Goggin, et.al. (1990). Dengan menggunakan pendekatan komunikasi, para penulis ini melihat implementasi sebagai suatu proses, serangkaian keputusan dan tindakan negara yang diarahkan untuk menjalankan suatu mandat yang telah ditetapkan. Implementasi, dalam pandangan mereka, sering disejajarkan dengan ketaatan (compliance) negara, atau suatu pemenuhan tuntutan prosedur hukum sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Implisit dalam pernyataan tersebut adalah

¹⁵ Ekowati, Lilik Roro Mas. *Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan atau Program* (

tidak adanya modifikasi atau perubahan terhadap suatu keputusan kebijakan yang justru dapat bertentangan dengan maksud para pembuat kebijakan¹⁶.

Suatu kebijakan yang telah diformulasikan oleh pemerintah tidak akan berarti tanpa diikuti dengan pelaksanaan kebijakan. *Chief J.O.Udoji* menyatakan bahwa pelaksanaan kebijaksanaan adalah sesuatu yang penting, bahkan lebih penting daripada pembuatan kebijaksanaan, karena kalau tidak ada implementasi maka kebijaksanaan hanya akan berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip¹⁷.

2.2 Model dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan

Implementasi kebijakan publik akan lebih mudah dipahami apabila menggunakan suatu model atau kerangka Implementasi Kebijakan Publik pemikiran tertentu. Suatu model akan memberikan gambaran kepada kita secara bulat lengkap mengenai sesuatu objek, situasi, atau proses. Komponen-komponen apa saja yang terdapat pada objek, situasi, atau proses tersebut.

Bagaimana korelasi-korelasi antara komponen-komponen itu satu dengan yang lainnya. Komponen-komponen model sistem implementasi kebijakan publik, terdiri atas : (1) program (kebijakan) yang dilaksanakan; (2) *target groups*, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran, dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut, perubahan atau peningkatan; (3) unsur pelaksana

¹⁶ Nugroho, Riant. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, Evaluasi*. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo , 2003

¹⁷ Wahab, Sholichin Abdul. *Analisis Kebijaksanaan, Dari Formulasi ke Implementasi*

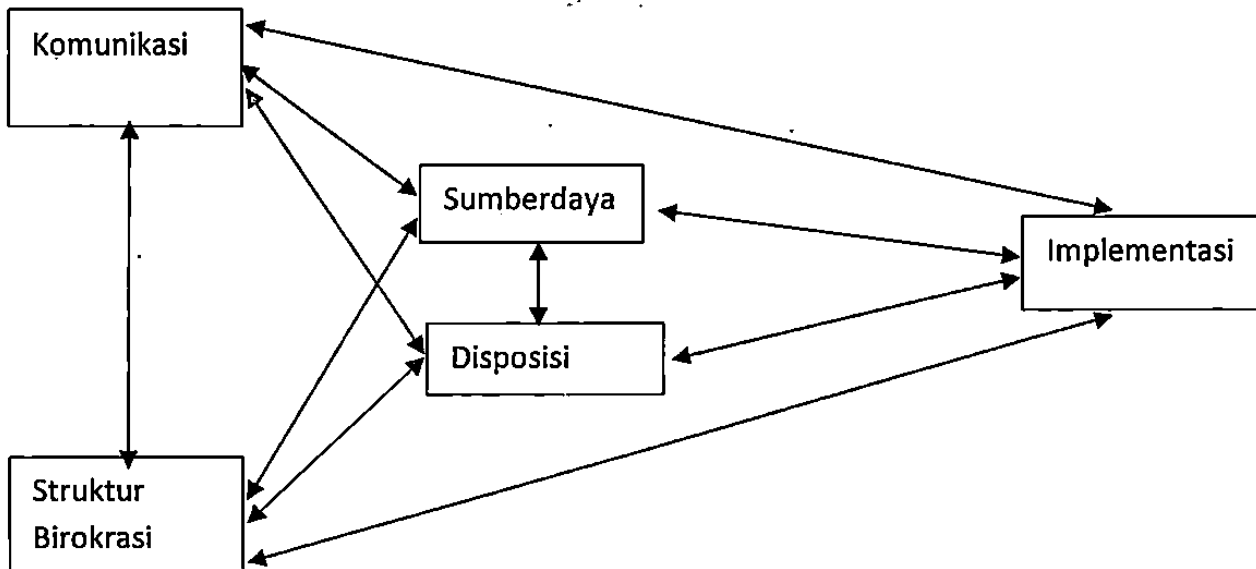
(*implementor*), baik organisasi atau perorangan, yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut; dan (4) faktor lingkungan (fisik, sosial, budaya dan politik)¹⁸. Disini akan dijelaskan beberapa model implementasi kebijakan.

Pertama, Model implementasi kebijakan yang berpektif *top down* menurut pandangan Edward III (1980). Dalam pandangan Edward implementasi kebijakan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yang diantaranya:

- a. Komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada organisasi dan atau publik, ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, sikap dan tanggap dari pihak yang terlibat, dan bagaimana struktur organisasi pelaksana kebijakan.
- b. Sumber Daya berkenaan dengan ketersediaan sumberdaya pendukung, khususnya sumberdaya manusia. Hal ini berkenaan dengan kecakapan pelaksana kebijakan publik untuk melaksanakan secara efektif.
- c. Disposisi berkenaan dengan ketersediaan dari pada implementator untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Kecakapan saja tidak mencukupi, tanpa kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan.
- d. Struktur Birokrasi, berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi pelaksana implementasi kebijakan publik. Tantangannya adalah agar tidak menjadi permasalahan birokrasi

karena struktur ini menjadi proses implementasi menjadi jauh dari efektif¹⁹.

Gambar 1.2 : Faktor Penentu Implementasi (Edwards III, 1980)



Sumber : Tesis armye yudha purwitasari, Implementasi kebijakan program jampersal di kabupaten lebak propinsi banten tahun 2011.

Kedua, model implementasi yang dikenalkan oleh Donald Van Meter dengan Carl Van Horn (1975). Dalam model ini implementasi kebijakan berjalan secara linier dari kebijakan publik, implementor, dan kinerja kebijakan publik.²⁰ Model ini menjelaskan bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel bebas yang saling berkaitan, variabel-variabel tersebut yaitu :

a. Standard dan tujuan

Standar dan tujuan kebijakan harus jelas dan terukur sehingga mudah untuk melaksanakan kebijakan dan mudah untuk mengetahui indikator dari kebijakan yang telah direalisasikan. Apabila standar dan

tujuan kebijakan tidak jelas atau kabur, maka akan terjadi

multiinterpretasi dan mudah menimbulkan konflik di antara para agen implementasi.

b. Sumberdaya

Implementasi kebijakan perlu adanya dukungan dari sumberdaya yang telah ada, baik sumberdaya manusia, sumberdaya alam, maupun sumberdaya keuangan. Sumberdaya manusia akan mempengaruhi bagaimana kebijakan dapat diimplementasikan dengan baik sesuai prosedur yang telah ada, sedangkan sumberdaya alam akan mempengaruhi kemampuan atau tingkat kendalan yang akan dihadapi saat melakukan implementasi, dan sumberdaya keuangan sangat berpengaruh suatu kebijakan. Semua sumberdaya dapat mempengaruhi kemampuan dari agen pelaksana atau implementator dalam mengimplementasi kebijakan.

c. Aktivitas implementasi dan komunikasi

Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu adanya dukungan dan koordinasi dengan pihak terkait, baik birokrat, instansi lain dan masyarakat. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan kerjasama antar semua elemen untuk mendukung keberhasilan suatu program.

d. Karakteristik dari agen pelaksana / implementator

Dalam suatu implementasi kebijakan agar mencapai keberhasilan maksimal harus diidentifikasi kondisi birokrasinya dan diketahui

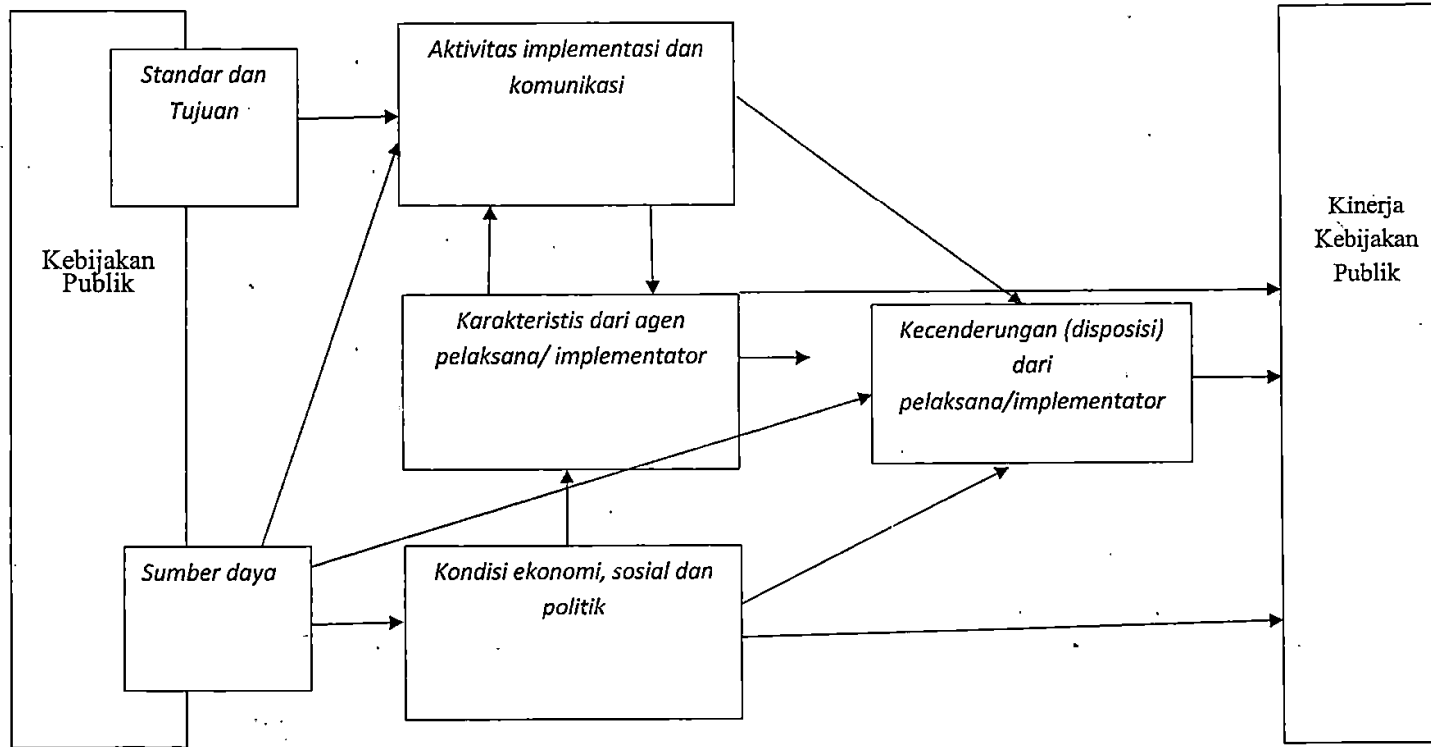
e. Kondisi ekonomi, sosial dan politik

Variabel ini mencakup masalah kondisi ekonomi, sosial dan politik yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Kondisi ekonomi sebagai tonggak awal dalam mengimplementasikan kebijakan, sejauh mana kondisi sosial masyarakat dan kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan ; karakteristik partisipan, yakni mendukung dan menolak ; bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.

f. Kecenderungan (disposisi) dari pelaksana / implementator

Dalam implementasi kebijakan sikap atau disposisi implementor sangat berpengaruh terhadap keberhasilan suatu kebijakan, sikap yang dimaksud dibedakan menjadi tiga hal yaitu respons baik atau buruknya implementor terhadap kebijakan, pemahamannya terhadap kebijakan, dan preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor terhadap suatu

Gambar 1.3 : Model Implementasi Donald Van Meter dan Carl Van Horn (1975)



Sumber : Nugroho, Riant. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, Evaluasi*. PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2003.

3. Ketahanan Pangan

Pada level nasional pengertian ketahanan pangan telah menjadi perdebatan selama tahun 1970 sampai tahun 1980an. Menurut Praktisi Agribisnis komoditas pangan Ir. Arif Budiman, MS dan DR. Ir. Suwardie, MSc dalam makalahnya menjelaskan ketahanan pangan adalah suatu keadaan dimana semua orang dalam suatu wilayah, sepanjang waktu, mempunyai akses baik secara fisik maupun ekonomi terhadap pangan yang bergizi, aman dan mencukupi kebutuhan dan preferensi makanan mereka untuk menjalani hidup yang aktif dan sehat²¹.

Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan²².

Ketahanan pangan didefinisikan sebagai suatu situasi dimana semua rumah tangga mempunyai akses baik secara ekonomi maupun secara fisik untuk mencukupi pangan buat warganya, dan rumah tangga tidak dalam posisi beresiko kehilangan akses²³.

Ketahanan pangan nasional tidak mensyaratkan untuk melakukan asambada produksi pangan karena tergantung pada sumberdaya yang dimiliki. Suatu negara bisa menghasilkan dan mengekspor komoditas pertanian yang

Ir. Arif Budiman, MS dan DR. Ir. Suwardie, MSc, *Peluang dan tantangan menuju pembangunan kedaulatan pangan, kemandirian dan ketahanan pangan (studi kasus pertanian organik padi lokal DIY)*

bernilai ekonomi tinggi dan barang-barang industri, kemudian membeli komoditas pangan di pasar internasional. Sebaliknya, negara yang melakukan swasembada produksi pangan pada level nasional, namun dijumpai masyarakatnya yang rawan pangan karena ada hambatan akses dan distribusi pangan.

Berdasarkan kenyataan yang terjadi di Indonesia banyak para petani kecil mengalami kesulitan makan, bahkan hingga mengalami kekurangan pangan seperti di Nusa Tenggara Barat. Menyadari bahwa kerawanan pangan terjadi dimana situasi pangan tersedia tetapi tidak mampu diakses rumah tangga karena keterbatasan sumberdaya ekonomi yang dimiliki (pendapatan, kesempatan kerja, sumberdaya ekonomi lainnya).

Sampai saat ini di Indonesia, banyak kalangan praktis dan birokrat kurang memahami pengertian swasembada pangan dengan ketahanan pangan. Akibat dari keadaan tersebut konsep ketahanan pangan seringkali diidentikkan dengan peningkatan produksi ataupun penyediaan pangan yang cukup. Perbedaan swasembada pangan dengan ketahanan pangan disajikan dalam Tabel.

Tabel 1.4 Perbedaan Swasembada Pangan dengan Ketahanan Pangan

Indikator	Swasembada Pangan	Ketahanan Pangan
Lingkup	Nasional	Rumah tangga dan individu
Sasaran	Komoditas pangan	Manusia
Strategi	Manusia	Peningkatan ketersediaan pangan, akses pangan, dan penyerapan pangan
output	Peningkatan produksi pangan	Status gizi (penurunan : kelaparan, gizi kurang dan gizi buruk)
Outcome	Kecukupan pangan oleh produk domestik	Manusia sehat dan produktif (angka harapan hidup tinggi)

Sumber : Nuhfil Hanani AR "*Pengertian Ketahanan Pangan*"

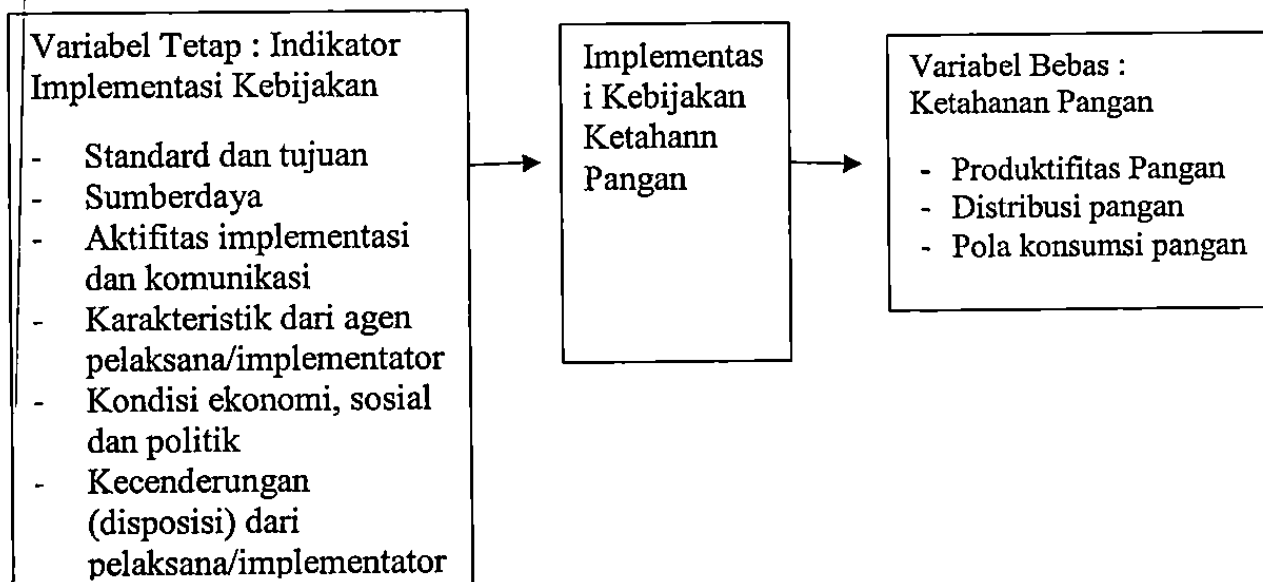
Swasembada pangan umumnya merupakan capaian peningkatan ketersediaan pangan dengan wilayah nasional, sedangkan ketahanan pangan lebih mengutamakan akses setiap individu untuk memperoleh pangan yang bergizi untuk sehat dan produktif.

Subsistem ketahanan pangan terdiri dari tiga sub sistem utama yaitu ketersediaan, akses, dan penyerapan pangan, sedangkan status gizi merupakan outcome dari ketahanan pangan. Ketersediaan, akses, dan penyerapan pangan merupakan sub sistem yang harus dipenuhi secara utuh. Salah satu subsistem tersebut tidak dipenuhi maka suatu negara belum dapat dikatakan mempunyai ketahanan pangan yang baik. Walaupun pangan tersedia cukup di tingkat nasional dan regional, tetapi jika akses individu untuk memenuhi kebutuhan pangannya

E. Variabel Penelitian

Variabel-variabel yang mempengaruhi dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu variabel bebas dan Variabel terikat. Menurut Stephen Robbins, variabel bebas merupakan sebab yang diperkirakan dari beberapa perubahan dalam variabel terikat atau variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau variabel terikat. Sedangkan variabel terikat merupakan faktor utama yang ingin dijelaskan atau diprediksi dan dipengaruhi oleh beberapa faktor lain²⁴. Hubungan variabel yang terjadi ialah hubungan asimetris, yang berarti variabel satu mempengaruhi variabel lainnya. Dalam konteks penelitian ini, variabel tetapnya indikator implementasi kebijakan akan mempengaruhi implementasi kebijakan dan implementasi kebijakan akan mempengaruhi ketahanan pangan. Untuk lebih mudah dipahami, berikut adalah bagan dari Variabel yang digunakan penelitian :

Gambar 1.4 : Variabel Penelitian



F. Definisi Konseptional

Definisi konseptional adalah suatu usaha untuk menjelaskan pembatasan pengertian antara konsep satu dengan konsep yang lainnya, supaya tidak terjadi kesalahpahaman berdasarkan pada kerangka teori yang telah dipaparkan. Berdasarkan penjelasan diatas ada beberapa penjelasan definisi konseptional yang dapat penulis berikan antara lain:

Kebijakan Publik : merupakan segala sesuatu yang dilakukan atau diputuskan oleh pemerintah juga mengenai hal yang tidak dilakukan pemerintah. Berarti Keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang berkaitan dengan masalah publik, sekaligus kebijakan publik merupakan output paling nyata.

Implementasi Kebijakan : aktivitas yang dijalankan oleh pemerintah terutama birokrasi, dengan mengikuti arahan-arahan tertentu setelah suatu kebijakan publik dikeluarkan agar menghasilkan efek atau hasil tertentu demi tercapainya tujuan suatu kebijakan.

ketahanan Pangan : kondisi terpenuhinya Pangan dalam negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan

G. Definisi Operasional

Defenisi operasional merupakan indikator-indikator yang akan dibutuhkan dalam penelitian dan digunakan untuk mendeskripsikan hal-hal yang akan diteliti. Adapun indikator-indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Implementasi Kebijakan : dalam penelitian implementasi kebijakan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Sleman, penulis menggunakan model Donald Van Meter dan Carl Van Horn (1975) dengan variabel-variabelnya sebagaiberikut :

- 1) Standard dan tujuan :
 - a) standar perumusan dan pelaksanaa kebijakan ketahanan pangan
 - b) tujuan kebijakan ketahanan pangan
- 2) Sumberdaya:
 - a) sumberdaya manusia
 - b) sumber daya keuangan dan
 - c) sumberdaya alam
- 3) Aktifitas implementasi dan komunikasi
 - a) Sosialisasi ketahanan pangan
 - b) Koordinasi ketahanan pangan
- 4) Karakteristik dari agen pelaksana/implementator
 - a) kondisi birokrasi Dewan Ketahanan Pangan dan Dinas Pertanian
 - b) karakteristik Dewan Ketahanan Pangan dan Dinas Pertanian.
- 5) Kondisi ekonomi, sosial dan politik

- b) kondisi sosial masyarakat dan
 - c) Kondisi politik.
- 6) Kecenderungan (disposisi) dari pelaksana/implementator
- a) respons Dinas Pertanian terhadap kebijakan,
 - b) pemahamannya Dinas Pertanian terhadap kebijakan dan,
 - c) preferensi nilai yang dimiliki oleh Dinas Pertanian terhadap kebijakan ketahanan pangan.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang dilakukan adalah melalui pendekatan kualitatif. Artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan, memo, dan dokumen resmi lainnya. Sehingga yang menjadi tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah ingin menggambarkan realita empirik di balik fenomena secara mendalam, rinci dan tuntas. Oleh karena itu penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah dengan mencocokkan antara realita empirik dengan teori yang berlaku dengan menggunakan metode diskriptif²⁵.

Menurut Prof.Dr.H. Hadad Nawawi, penelitian deskriptif dapat diartikan sebagai proses pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambar atau

melukiskan keadaan objek/penelitian (seseorang/lembaga masyarakat) berdasarkan fakta.²⁶ Penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan atau melukiskan realitas sosial yang kompleks yang ada di masyarakat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan-hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena²⁷. Tujuan penulisan deskriptif adalah untuk membuat perencanaan secara sistematis faktual dan aktual mengenai fakta-fakta dan populasi daerah tertentu.

2. Unit analisis

Dalam penelitian ini, bahan yang digunakan sebagai unit analisisnya adalah kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah daerah Kabupaten Sleman dalam masalah pangan, sekaligus subyek penelitian sebagai suatu kesatuan unit yang akan diteliti. Sedangkan dalam penelitian ini, birokrasi yang langsung berkaitan ialah Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Sleman sebagai perumus dan Dinas Pertanian sebagai pelaksana kebijakan ketahanan pangan di daerah Sleman. Dalam penelitian ini, yang menjadi narasumber ialah aparaturnya terkait masalah pangan, seperti Kepala Dewan Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dan Penyuluhan, Seksi Ketersediaan Pangan, dan Seksi Distribusi dan Penganeragaman Makanan Kabupaten Sleman.

²⁶ Hadad Nawawi, *Metodelogi Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta, Gajah Mada Universiti Pres, 1999.

3. Sumber Data

3.1. Data Primer

Menurut S. Nasution data primer adalah data yang dapat diperoleh langsung dari lapangan atau tempat penelitian²⁸. Data-data yang bisa didapat langsung dari lapangan berupa Standard, tujuan, dan indikator pelaksanaa kebijakan ketahanan pangan, Sumberdaya manusia, keuangan dan alam, Aktifitas implementasi dan komunikasi Kebijakan, Karakteristik dari agen pelaksana/implementator, Kondisi ekonomi, sosial dan politik, Kecenderungan (disposisi) dari pelaksana/ implementator. Dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan data ini untuk mendapatkan informasi langsung tentang Implementasi kebijakan ketahanan pangan di daerah Kabupaten Sleman. melengkapi informasi yang telah dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan para Birokrasi yang berkaitan.

Tabel 1.5 : Sumber Data Primer

No	Data Primer Yang Diperlukan	Sumber Data
1	Standard, tujuan, dan indikator pelaksanaa kebijakan ketahanan pangan	Pemerintah
2	Sumberdaya manusia, keuangan dan alam	Pemerintah
3	Aktifitas implementasi dan komunikasi Kebijakan	Pemerintah
4	Karakteristik dari agen pelaksana/implementator	Pemerintah
5	Kondisi ekonomi, sosial dan politik	Pemerintah
6	Kecenderungan (disposisi) dari pelaksana/ implementator	Pemerintah

²⁸ S. Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, 1964

3.2.Data sekunder

Data sekunder adalah data-data yang didapat dari sumber bacaan dan berbagai macam sumber lainnya yang terdiri dari laporan-laporan dan dokumen-dokumen resmi dari berbagai instansi pemerintah. Data sekunder yang didapat berupa :

Tabel 1.6 : Sumber Data Sekunder

No	Data Primer Yang Diperlukan	Sumber Data
1	Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Sleman Tahun anggaran 2011	webside Pamkab Sleman (<i>www.Slemankab.go.id</i>)
2	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sleman tahun 2011-2015	webside Pamkab Sleman (<i>www.Slemankab.go.id</i>)
3	Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Sleman	webside Pamkab Sleman (<i>www.Slemankab.go.id</i>)
4	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Sleman Tahun 2011	webside Pamkab Sleman (<i>www.Slemankab.go.id</i>)
5	Surat kabar	Media cetak dan <i>on-line</i>
6	Pelaksanaan Program/Kegiatan Peningkatan ketahanan Pangan DiKabupaten Sleman	Pemerintah
7	Keputusan Bupati Sleman Nomor : 255 tentang Dewan Ketahanan Pangan Sleman	Pemerintah
8	Data Sumberdaya Manusia atau birokrasi Bidang ketahanan Pangan dan Penyuluhan Dinas pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Sleman.	Pemerintah
9	Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi Dan Kabupaten/Kota	Pemerintah

4. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian di samping harus menggunakan metode yang tepat, juga perlu memilih teknik dan alat pengumpulan data yang relevan, agar penelitian bisa dipertanggungjawabkan keobjektifan dari hasil penelitian. Metode yang digunakan untuk proses pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan proses triangulasi, yaitu²⁹:

a. Wawancara

Metode wawancara adalah sebuah dialog atau Tanya jawab yang dilakukan dua orang atau lebih yaitu pewawancara dan terwawancara (nara sumber) dilakukan secara berhadap-hadapan (*face to face*)³⁰. Percakapan itu dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dari yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan atas itu. Wawancara digunakan oleh peneliti untuk menggunakan menilai keadaan seseorang. Wawancara tersebut biasa dilakukan secara individu maupun dalam bentuk kelompok, sehingga didapat data informatik yang orientik. Dalam penelitian ini, yang menjadi responden wawancara ialah kepala seksi distribusi dan penganekaragaman pangan, dan kepala seksi ketersediaan pangan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang berarti barang

²⁹ Lexy Moleong, J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT Remaja Rosda Karya.2004.

³⁰ Lexy Moleong, J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT Remaja Rosda Karya.2004.

tertulis, metode dokumentasi berarti cara pengumpulan data dengan mencatat data-data yang sudah ada³¹. Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan buku, surat, transkrip, majalah, prasasti, notulen, rapat, lengger, agenda dan sebagainya. Teknik atau studi dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil-dalil atau hukum-hukum dan lain-lain berhubungan dengan masalah penelitian. Dalam penelitian kualitatif teknik pengumpulan data yang utama karena pembuktian hipotesisnya yang diajukan secara logis dan rasional melalui pendapat, teori, atau hukum-hukum, baik mendukung maupun menolak hipotesis tersebut.

5. Teknik Analisa Data

Tujuan dari analisa data pada dasarnya adalah untuk menyederhanakan data dalam bentuk yang mudah dipahami. Analisa data ini dalam penelitian deskriptif kualitatif adalah induksi interpretative yaitu usaha pengambilan keputusan berdasarkan dan perkiraan logis atas data perkiraan yang diperoleh. Pendekatan interpretative dalam ilmu social dimulai dengan pemahaman intelektual yang dibangun berdasarkan empiris sensual dan empiris logic teori.

Langkah-langkah dalam proses penelitian deskriptif kualitatif adalah

³¹ M. G. D. ... Melalui Penelitian Pendidikan ... Surabaya : SIC, 1996

- a) Membaca dan mempelajari data yang terkumpul sampai dikuasai sepenuhnya sambil memikirkan untuk mencari apakah ada pola-pola yang menarik.
- b) Melihat berbagai konsep yang timbul yang digunakan responden
- c) Menerangkan sejumlah data dan metode untuk mengumpngkan data dan metode untuk mengungkapkan karakteristik kategori data tertentu.
- d) Mencari hubungan antar konsep dalam usaha mengembangkan suatu teori.

Setelah melalui langkah-langkah tersebut, maka data yang telah diperoleh

dilumpuhkan dimana diidentifikasi untuk selanjutnya ditarik suatu